

## **STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**Thuty Utami Agustia**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, koordinasi, pengawasan, serta evaluasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan. PNPM Mandiri berupaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kemandirian yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh anggota PNPM Mandiri yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator kelurahan (faskel), Unit Pengelola (UP), Kelompok swadaya Masyarakat (KSM). Pengumpulan data dilakukan dengan riset pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pertama, pengajuan proposal kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus didampingi oleh Unit Pengelola (UP) sampai penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kedua, dalam pengkoordinasian anggota PNPM Mandiri kurang dilakukan dan kurang berkomunikasi dalam melaksanakan kegiatan. ketiga, pengawasan dilakukan bersama-sama oleh anggota PNPM Mandiri harus secara teori dan ditetapkan menurut prosedur. Keempat, evaluasi dalam rapat dilakukan sampai tengah malam, dan para anggota PNPM mandiri tidak ada cukup waktu luang dalam membantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan.*

***Kata kunci*** : Program PNPM Mandiri, Kelurahan Sempaja Selatan,

## **Pendahuluan**

Untuk mengatasi kemiskinan sangat dibutuhkan suatu solusi yaitu mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan pembangunan yang dapat dirasakan di setiap daerah Indonesia dan di seluruh lapisan masyarakat. Maka pemerintah menetapkan otonomi daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang pemerintahan daerah dimana setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di daerahnya.

Penanganan permasalahan kemiskinan yang selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan dimana kemiskinan bukan semakin berkurang, tapi justru malah makin bertambah. Maka mencermati dari situasi sosial tersebut pemerintah mengeluarkan rencana melalui kebijaksanaan public yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Melalui program tersebut, diharapkan pada gilirannya dapat tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Program PNPM Mandiri diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses rencana PNPM Mandiri yang membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

PNPM Mandiri merupakan program yang mempunyai kunci keberhasilannya terletak pada partisipasi masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, maka bila dalam suatu Kelurahan tidak adanya partisipasi dipastikan program PNPM Mandiri tidak akan berjalan dengan baik. Untuk memberikan penyadaran masyarakat dengan penuh ragam watak dan karakternya, diwilayah perkotaan dimana individualisme tinggi, kebersamaan dan kepedulian yang sudah mulai luntur maka dalam merubah paradigma atau cara pandang yang sudah melekat bertahun-tahun tersebut sangatlah sulit. Dari hasil pengamatan penulis di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, adapun permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Unit Pengelola sehingga menyebabkan seringnya kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. Dikarenakan Program PNPM Mandiri ini dilaksanakan secara

ikhlas, rasa tanggung jawab yang besar dan gotong royong, tanpa mengharapkan imbalan materi. Dan dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kurangnya kesadaran pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, UP dan KSM dalam pengawasan di PNPM Mandiri.

### ***Perumusan Masalah***

1. Bagaimana mekanisme, koordinasi, pengawasan dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam mekanisme, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui mekanisme, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mekanisme, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Kebijakan Publik***

Menurut Islami (2007:18) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

David Easton (dalam Kismartini, 2007:19) memberikan batasan bahwa "*Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.*"

#### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Edi Sedyawati (buku 1, 2007:184) pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat, serta unit kecilnya, yaitu keluarga, perlu diberdayakan dalam aspek ekonominya. Budimanta & Rudito (2008:39), memasukkan konsep pemberdayaan masyarakat ini ke dalam ruang lingkup Community Development. Pemberdayaan di

sini diterjemahkan sebagai program-program yang berkaitan dengan upaya memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

### ***Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri***

#### **a. Kategori Program PNPM Mandiri**

Berdasarkan (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007:17) terdiri dari 2 kategori sebagai berikut:

- 1) PNPM Inti yaitu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan ada 4 (empat) program pokok PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:
  - a) PNPM Mandiri Perdesaan.
  - b) PNPM Mandiri Perkotaan.
  - c) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan.
  - d) PNPM Mandiri DTK (Daerah Tertinggal dan Khusus).
- 2) PNPM Penguatan yaitu program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu.

#### **b. Pendekatan PNPM Mandiri**

- 1) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- 2) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- 3) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- 4) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- 5) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat.

#### **c. Prinsip – Prinsip PNPM Mandiri**

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia.
- 2) Otonomi.
- 3) Desentralisasi.
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin.
- 5) Partisipasi.
- 6) Kesetaraan dan kesamaan gender.
- 7) Demokratis..
- 8) Transparansi dan Akuntabel.
- 9) Prioritas.
- 10) Kolaborasi.
- 11) Keberlanjutan.

12) Sederhana.

### ***Peningkatan Kesejahteraan***

Menurut Sudarman Manim (1995:7) yang dimaksud dengan tingkat kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan seseorang baik sosial material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentrangan lahir dan batin sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya.

### ***Pengertian Masyarakat***

Menurut Koentjaraningrat (2001:17) masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi melalui suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.

Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2000:26) menyatakan bahwa masyarakat suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.

### ***Definisi Konsepsional***

Mekanisme pelaksanaan program, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dalam upaya menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan pemerintah dan para relawan dari masyarakat yaitu seperti lurah, faskel, BKM, UPL, UPS, UPK dan juga KSM untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan hasil yang dicapai.

### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan, maka jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang diteliti.

#### ***Lokasi Penelitian***

Tempat Penelitian dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.

#### ***Fokus Penelitian***

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri
  - a. Mekanisme pelaksanaan Program PNPM Mandiri dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :
    - 1) Aspek Lingkungan
    - 2) Aspek Sosial
    - 3) Aspek Ekonomi
  - b. Koordinasi Program PNPM Mandiri
  - c. Pengawasan terhadap Program PNPM Mandiri
  - d. Evaluasi Program PNPM Mandiri
2. Kendala dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri

Dalam penelitian ini, penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling dan Teknik accidental sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Bapak Lurah Sempaja Selatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Faskel (fasilitator kelurahan), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK).

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
  - a. Observasi
  - b. Wawancara
  - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

### ***Analisis Data***

Teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

### ***Pembahasan***

***Mekanisme Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam 3 (tiga) aspek terdiri dari:***

- 1) Aspek Lingkungan.

Berdasarkan Pedoman Teknis Keorganisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2008:3 Unit Pengelola Lingkungan adalah unit kerja yang diangkat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur / lingkungan. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) mempunyai peranan yang penting dalam mengelola

kegiatan-kegiatan infrastruktur/lingkungan dan bertugas membantu masyarakat dalam menyiapkan hal-hal teknis yang tidak dapat masyarakat sendiri melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap pelaku-pelaku (BKM, UPL dan Faskel) yang menjalankan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri mengatakan bahwa peran Unit Pengelola Lingkungan (UPL) sangat diperlukan dalam membantu masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan yang berhubungan dengan teknis seperti : Unit Pengelola Lingkungan (UPL) di pilih oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), membantu Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) secara administrative, melakukan pendampingan dalam pembuatan proposal serta memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) yang juga akan di masukan dalam laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) melakukan pengendalian kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan (pemukiman dan infrastruktur) agar menjalin kemitraan dengan pihak-pihak luar untuk mendukung program lingkungan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

## 2) Aspek sosial

Pada umumnya masyarakatnya banyak yang mengalami kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan rata-rata dari penduduk yang masih dibawah taraf kesejahteraan. Selain itu juga banyak terdapat warga jompo yang sudah tidak bisa bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya sehingga banyak tergantung dari bantuan. Sedangkan untuk janda/duda, karena ditinggal salah satu pasangannya dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga mereka menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja secara serabutan dengan hasil yang kurang memadai. Dan untuk beasiswa, banyak anak-anak yang tidak mampu untuk membiayai sekolahnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari hasil wawancara terhadap para Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Fasilitator Kelurahan (Faskel), menyatakan bahwa Unit Pengelola Sosial bekerjasama dan mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan kegiatan sosial dari tahap awal perencanaan hingga pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), yang kegiatan sosialnya berupa pelatihan/kursus cepat, bea siswa serta santunan terhadap lansia dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengendalikan kegiatan sosial serta membangun kontrol sosial masyarakat melalui media dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak luar untuk mendukung program Unit Pengelola Sosial (UPS).

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pihak Unit Pengelola Sosial (UPS) sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sosial PNPM Mandiri sesuai dengan Pedoman Teknis Keorganisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (2008:5) dan Pedoman Tugas dan Fungsi UP (2009:10) yaitu, Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk menjamin terlaksananya PJM Pronangkis bidang Sosial, melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia,

mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial, mendorong dan memfasilitasi Komunitas Belajar Kelurahan, mengembangkan media warga, menjalin kemitraan dengan pihak lain.

### 3) Aspek Ekonomi

Hasil data penelitian dari wawancara terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) menjelaskan bahwa Unit Pengelola Keuangan mengadakan program dana peminjaman bergulir untuk permodalan usaha kecil mandiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) mengelola kas Badan Keswadayaan Masyarakat yang diberi oleh Pemerintah, pengelolaannya dalam hal pencairan dana ke Kelompok Swadaya Masyarakat serta pelaporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada semua anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Unit Pengelola Keuangan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dan prinsip dalam Modul Pinjaman bergulir (2009:5-7) yaitu, dalam tujuannya pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

### ***Koordinasi Program PNPM Mandiri***

Dari hasil wawancara terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), serta Unit Pengelola Keuangan (UPK) menyatakan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat meneliti proposal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang di bantu/di damping oleh Unit Pengelola, lalu Unit Pengelola di perintahkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk meneliti kelayakan di lapangan apakah sesuai dengan proposal yang di ajukan. Bila sesuai dengan proposal lalu dilakukan pencairan dana secara langsung, setiap Unit Pengelola harus mendampingi dan mengawasi kegiatan Kelompok Swada Masyarakat hingga dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Sebelum kegiatan dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di bantu oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) dalam menjelaskan detail pelaksanaan program PNPM Mandiri lalu.

Dapat dilihat dari pembahasan tersebut, bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, Unit Pengelola serta Faskel haruslah sesuai dengan prosedur. Dalam hal ini para pelaku PNPM Mandiri cukup paham dalam melaksanakan sistem koordinasi kegiatan PNPM Mandiri haruslah sesuai dengan prosedur dan pedoman serta modul PNPM Mandiri.

### ***Pengawasan Terhadap Program PNPM Mandiri***

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) mengatakan



bahwa secara teori pengawasan dilakukan bersama semua anggota yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri serta warga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak melenceng dari tujuan awal. Jika dilihat dari pernyataan di atas bahwa anggota PNPM Mandiri haruslah mengikuti prosedur dan Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat (2007:27) yang disebutkan bahwa dalam pengawasan diperlukannya ada :

- 1) Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat.
- 2) Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah.
- 3) Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator.
- 4) Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya.

### ***Evaluasi PNPM Mandiri***

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) menyatakan bahwasanya Evaluasi di bagi dalam 2 (dua) tahap yaitu; tahap pertama evaluasi kegiatan tiap-tiap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tahap kedua evaluasi dalam satu tahun dilakukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan dalam pengevaluasiannya sudah dilaksanakan sesuai prosedur . Pengevaluasian di lakukan oleh Unit Pengelola dan fasilitator yang bertugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengevaluasian yang di lakukan di Kelurahan Sempaja Selatan sudah optimal dan sesuai Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (2007:29) yang menjelaskan, kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Dan sesuai dengan Modul Musrenbang (2009:21-22) menjelaskan, Penyusunan Jadwal dan agenda musrenbang kelurahan, Mengkoordinir persiapan logistic (tempat, konsumsi, alat dan bahan), Pelaksanaan kajian kelurahan (per RT atau per sector pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan kelurahan, serta Penyusunan rancangan awal Rencan Kerja Pemerintah (RKP) yang diturunkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja (Renja) Kelurahan yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan terutama urusan pembangunan, dan Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.

### ***Kendala Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri***

#### **a. Faktor Kurangnya Waktu Dalam Menjalankan Tugas**

Berdasarkan hasil pengamatan , pertemuan rapat evaluasi yang harus dihadiri dari jam 20.00 WITA - 01.00 WITA malam dan keterbatasan waktu Unit Pengelola dalam melakukan peninjauan lapangan maupun sampai tahap pendampingan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga penjelasan tersebut secara tidak langsung menghambat terlaksananya PNPM Mandiri secara optimal seperti yang di

sebutkan dalam buku pedoman dan harapan pemerintah dalam mengoptimalkan bantuan dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wandhie disiplin dalam menggunakan waktu, maksudnya bisa menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Karena waktu amat berharga dan satu kunci kesuksesan adalah dengan bisa menggunakan waktu dengan baik. (<http://wandhie.wodpress.com/pengertian-kedisiplinan.html>. Diakses 14 Juli 2013)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Sempaja Selatan bahwa kedisiplinan kerja para anggota PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan masih sangat rendah dalam melayani masyarakat dan ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wandhie. Dimana anggota PNPM Mandiri kurang disiplin hal ini dibuktikan dengan kurangnya pembagian waktu antara tugasnya sebagai anggota PNPM Mandiri dalam mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan waktu pekerjaannya sehari-hari dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan pribadi.

b. Kurangnya Informasi Untuk Mencari Masyarakat yang Layak Mendapatkan Bantuan

Dari hasil penelitian yang di dapat, pihak PNPM Mandiri menyatakan bahwa mereka terkadang sulit mencari warga yang benar-benar layak dalam mengikuti kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan dalam menerima bantuan sosial. Seperti yang di dsampaikan oleh Ewawan, informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan. Maka dengan demikian sumber informasi adalah data, kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. (<http://ewawan.com/pengertian-informasi-definisi-informasi.html>. Diakses 14 Juli 2013).

Dari penjelasan diatas, seharusnya anggota PNPM Mandiri lebih bisa teliti dan memilah yang mana masyarakat yang layak mendapatkan bantuan di Kelurahan Sempaja Selatan, walaupun sudah di bantu pihak kelurahan dalam pemberian data. Dalam hal ini anggota PNPM Mandiri bisa terjun langsung kelapangan dan melihat sendiri, apakah proposal yang diajukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat sesuai dengan di lapangan. Dapat dilihat, bahwa pendapat Ewawan dengan hasil penelitian yang di dapat, tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c. Kurangnya Relawan atau Anggota Dalam Mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dari hasil penelitian yang di dapat, bahwa kurangnya minat peserta/masyarakat dalam mengikuti kegiatan PNPM Mandiri sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian relawan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sehingga para Kelompok Swadaya Masyarakat terkadang melakukan kesalahan dalam kegiatan dikarenakan jumlah para relawan yang menjadi anggota PNPM Mandiri terlalu sedikit untuk melakukan pendampingan. Dalam buku Pedoman PNPM Mandiri (2007:III) menjelaskan bahwa “relawan-relawan adalah

orang-orang yang memiliki niat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakat miskin diwilayahnya. Tidak ada batasan jumlah relawan dalam satu wilayah, karena siapapun yang ikhlas dan peduli dapat terlibat dan member kontribusi untuk membantu masyarakat dalam proses pelaksanaan PNPM Mandiri diwilayahnya.”

Dari penjelasan tersebut, bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai harapan yang dikemukakan di buku Pedoman Mandiri. Seharusnya dengan banyak jumlah para relawan dalam mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat, akan membantu percepatan pembangunan di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan.

d. Faktor Kurangnya Komunikasi dalam Melaksanakan Pengawasan

Anggota PNPM Mandiri yang menyatakan bahwa saat proses administrasi dan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terjadi kesalahpahaman dan masih terdapat celah penyalahgunaan dana kegiatan PNPM Mandiri yang datang dari anggota PNPM itu sendiri. Menurut Richard West dan Lynn Turner (2008:339-349) bahwa informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dimana teori tersebut menekankan proses individu dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa komunikasi antar anggota PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan kurang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil dilapangan dengan hasil dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) serta hasil evaluasi berbeda. Dapat dilihat bahwa anggota PNPM Mandiri kurang melakukan sosialisasi secara mendetail terhadap warga/masyarakat untuk mengikuti kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan.

e. Faktor Kurangnya Dana Bantuan dalam Memperbaiki Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menyatakan bahwa dana bantuan yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri masih kurang, karena masih banyak sarana dan prasarana yang harus dibenahi di Kelurahan Sempaja Selatan. Dalam hal ini Pedoman PNPM Mandiri (2009:25) memberikan penjelasan bahwa dana hanya menjadi pancingan agar masyarakat mau berswadaya dan membangkitkan kesadaran diri dalam bergotong royong untuk melaksanakan pembangunan.

Dalam masalah ini , masyarakat belum mengerti dan paham maksud proses pendanaan dari Pelaksanaan PNPM Mandiri. Sehingga masyarakat berpikiran, PNPM Mandiri secara keseluruhan kegiatan harus membantu secara maksimal tanpa adanya dana tambahan dari masyarakat. Hanya mengharapkan sumber dana dari pemerintah saja. PNPM Mandiri di bentuk untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu “berdaya” memenuhi kebutuhan hidupnya (fisik dan non fisik).

### ***Penutup***

a. Mekanisme pelaksanaan Program PNPM Mandiri dalam 3 (tiga) aspek:

Aspek Lingkungan. Peran Unit Pengelola Lingkungan (UPL) sangat diperlukan dalam membantu masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan yang berhubungan dengan teknis seperti : Membantu KSM secara administrative, memberikan laporan perkembangan kegiatan KSM kepada BKM yang nanti juga akan di masukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di buat oleh KSM, membantu BKM menilai kelayakan pengajuan proposal yang di berikan oleh KSM.

Aspek Sosial. Pihak Unit Pengelola Sosial (UPS) sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan social PNPM mandiri sesuai dengan Pedoman Teknis Keorganisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (2008:5) dan Pedoman Tugas dan Fungsi UP (2009:10) yaitu, Bekerjasama dengan BKM/LKM untuk mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang social, mendorong dan memfasilitasi Komunitas Belajar Kelurahan, mengembangkan media warga, menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Aspek Ekonomi. Unit Pengelola Keuangan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dan prinsip dalam Modul Pinjaman bergulir (2009:5-7) yaitu, dalam tujuannya pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

b. Kooordinasi Program PNPM Mandiri.

Dalam kegiatan PNPM Mandiri ini, diperlukan koordinasi antara Unit Pengelola (UP) dengan Badan Keswadayaan Masyarkat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk melakukan pembangunan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dan pembagian kerja yang jelas serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan.

c. Pengawasan terhadap Program PNPM Mandiri.

Melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) , Unit pengelola (UP), dan Kelompok swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Sempaja Selatan, harus diadakannya pengawasan dalam melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan serta mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

d. Evaluasi Program PNPM Mandiri.

Evaluasi baru dapat dilakukan jika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berjalan dalam satu periode, dan pelaksanaannya sesuai dengan tahapan yang telah dirancang sehingga nantinya dapat diketahui kekurangan-kekurangan dari program-program yang telah berjalan di Kelurahan Sempaja Selatan agar menjadi pertimbangan dan penilaian untuk penyusunan program-program pemberdayaan pada tahun berikutnya.

e. Faktor Kurangnya Waktu Dalam Menjalankan Tugas

Masih terhambatnya para pelaku/anggota PNPM Mandiri membagi waktu antara tugas dalam kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Keterbatasan waktu Unit Pengelola dalam melakukan peninjauan lapangan maupun sampai tahap pendampingan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

f. Kurangnya Informasi Untuk Mencari Masyarakat yang Layak Mendapatkan Bantuan

Pihak PNPM Mandiri terkadang sulit mencari warga yang benar-benar layak dalam mengikuti kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan dalam menerima bantuan sosial. Dalam hal ini anggota tidak terjun langsung hanya mendapatkan informasi dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan data dari Kelurahan.

g. Kurangnya Relawan atau Anggota Dalam Mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Para Kelompok Swadaya Masyarakat terkadang melakukan kesalahan dalam kegiatan dikarenakan jumlah para relawan yang menjadi anggota PNPM Mandiri terlalu sedikit untuk melakukan pendampingan.

h. Faktor Kurangnya Komunikasi dalam Melaksanakan Pengawasan

Saat proses administrasi dan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terjadi kesalahpahaman dan masih terdapat celah penyalahgunaan dana kegiatan PNPM Mandiri yang datang dari anggota PNPM itu sendiri.

i. Faktor Kurangnya Dana Bantuan dalam Memperbaiki Sarana dan Prasarana

Masyarakat belum mengerti dan paham maksud proses pendanaan dari Pelaksanaan PNPM Mandiri. Sehingga masyarakat berpikiran, PNPM Mandiri secara keseluruhan kegiatan harus membantu secara maksimal tanpa adanya dana tambahan dari masyarakat. PNPM Mandiri di bentuk untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu “berdaya” memenuhi kebutuhan hidupnya (fisik dan non fisik).

Anggota PNPM Mandiri diharapkan mengatur penyesuaian jadwal-jadwal kegiatan PNPM Mandiri untuk anggota PNPM Mandiri dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan pekerjaan sehari-hari agar tidak terjadinya benturan waktu sehingga tidak menghambat dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Diharapkan anggota PNPM Mandiri di Kelurahan Sempaja Selatan lebih bisa teliti dan memilah informasi yang mana masyarakat yang layak mendapat bantuan PNPM Mandiri. Seharusnya anggota PNPM Mandiri langsung terjun melihat dan mendapati masyarakat yang layak.

Diperlukan semangat dan sifat aktif dalam diri para anggota PNPM Mandiri dalam menyampaikan kegiatan PNPM Mandiri, serta penyampainnya lebih ke

praktek daripada teori. Agar masyarakat lebih tahu dan memahami kegiatan PNPM Mandiri sangat baik manfaatnya untuk masyarakat di Kelurahan sempaja Selatan. .

Pengawasan harus dilakukan anggota PNPM Mandiri dengan cara bersama, melakukan komunikasi satu sama lain dalam hal perencanaan, pelaksanaannya maupun pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sampai saat evaluasi semua kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan PNPM Mandiri selama satu periode.

Sebaiknya anggota PNPM mandiri menjelaskan lebih detil apa maksud dari kegiatan PNPM Mandiri, tujuannya adalah membuat masyarakat berdaya dan mandiri, tidak sepenuhnya di bantu oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan fasilitas dan solusi.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Syani, 2002. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bridgman, Peter dan Davis, Glyn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta : Indonesia Center For Sustainable Development.
- Gunawan Sumodiningrat; *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, 2002.
- Islamy, DR.M.Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. 2007.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.: PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. 2008.
- .Sedyawati, Edi. *Keindonesiaan Dalam Budaya*. Penerbit Wedatama Widya Sastra. Jakarta. 2007.
- Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*. Penerbit CV. Haji Masagung. Jakarta. 2002.
- Sulistriyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta. 2004.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama. Jakarta. 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Penerbit cv Alfabeta. Bandung. 2005.

- Suyanto, Bagong & Karnaji. *Kemiskinan dan kesenjangan sosial: ketika pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin*. Penerbit Airlangga University. Press. Surabaya 2005.
- Sudarman Danim. *Transformasi Sumber Daya Manusia: Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Perilaku dan Kesejahteraan Manusia Indonesia masa Depan*. Bumi Aksara.Jakarta.1995.
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*.(Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas gajah Mada.
- Tachjan.2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung
- West, Richard dan Turner, Lynn H.2008.*Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*.Jakarta: PT.Salemba Humanika.Hal 339-349

### **Dokumen-dokumen**

2008. *Konsep PNPM Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
2007. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
2008. *Pedoman Teknis Keorganisasian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
2009. *Pedoman Tugas dan Fungsi Up*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta
2009. *Modul Pinjaman Bergulir*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta

### **Sumber-Sumber Internet**

- Kismartini,2007.<http://globalonlinebook.blogspot.com/2013/03/konsep-kebijakan-publik.html>. (diakses 12 Januari 2013)
- Widodo,2010.*Implementasi Kebijakan (Goerge Edward III)*.  
<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>.(diakses 24 Juni 2013)
- <http://wandhie.wodpress.com/pengertian-kedisiplinan.html> (diakses 14 Juli 2013)
- <http://ewawan.com/pengertian-informasi-definisi-informasi.html> (diakses 14 Juli 2013)